



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI



GOVERNMENT PROCUREMENT PROCEDURES

Towards Construction Services Procurement

2019

DR. IR. SYARIF BURHANUDDIN, M. ENG.
DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI

GEDUNG A GRAHA UTAMA KEMDIKBUD, 25 JUNI 2019

Outline

1

Isu Terkini Pengadaan Jasa Konstruksi

2

Solusi dan Arah Kebijakan



Isu Terkini Pengadaan Jasa Konstruksi

1





Isu Terkini Pengadaan Jasa Konstruksi





Kementerian PUPR

- 1 Lelang tidak transparan
- 2 Keberpihakan pada Badan Usaha Kecil dan Menengah dirasakan kurang
- 3 Persyaratan tender/ seleksi tidak terstandar dan sering berbeda-beda tiap Unit Organisasi
- 4 Sistem pengadaan secara elektronik belum sempurna mengakomodir kebutuhan tender/ seleksi jasa konstruksi
- 5 Fokus percepatan infrastruktur berupa proyek strategis nasional bertumpu pada paket pekerjaan bernilai besar
- 6 Pembatasan pemberlakuan aturan pengadaan jasa konstruksi hanya untuk APBN saja
- 7 Independensi Pokja masih diintervensi oleh Unit Organisasi



Potret Pengadaan Jasa Konstruksi

Visium Infrastruktur PUPR 2030

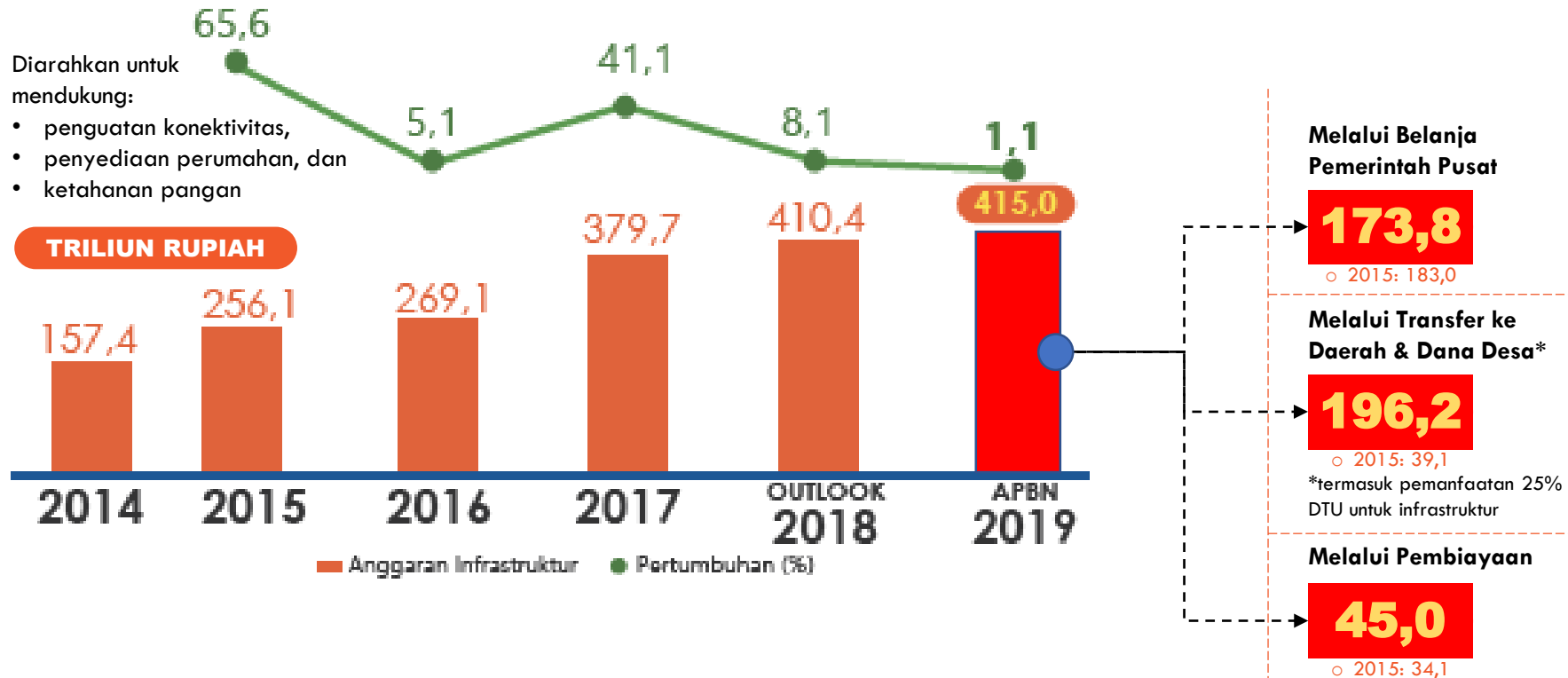
| |  SUMBER DAYA AIR |  BINA MARGA |  CIPTA KARYA |  PENYEDIAAN PERUMAHAN |
|---------------------------------|--|---|--|--|
| RENSTRA PUPR 2015 - 2019 | Kapasitas Tampung 50 m3/c/th (baseline 2014) Anggaran Rp.316 T | Jalan Mantap 98% Jalan Tol 1000 Km Jalan Baru 2650 Km Jembatan Baru/ FO 29.859 M Anggaran Rp.278 T | 100% Air Minum 0 ha Kumuh 100% Sanitasi Anggaran Rp.128 T | 5,4 jt Backlog MBR Pembangunan 4,47 juta unit Anggaran Rp.186 T |
| GAP 2017 - 2019 | Kapasitas Tampung 57,75 m3/c/th Anggaran Rp.306 T | Jalan Mantap 94% Jalan Tol 824 Km Jalan Baru 1.320 Km Jembatan Baru/FO 39.000 M Anggaran Rp.183 T Investasi Rp.202 T | 78% Air Minum 27.000 ha Kumuh 75% Sanitasi Anggaran Rp.45 T | 5,4 jt Backlog MBR Pembangunan 2,76 juta unit Anggaran Rp.414 T 10% APBN/APBD 90% Masyarakat |
| VISIUM 2020-2024 | Kapasitas Tampung 68,11 m3/c/th Anggaran Rp.577 T | Jalan Mantap 97% Jalan Tol 1.500 Km Jalan Baru 2.500 Km Jembatan Baru/FO 60.000 M Anggaran Rp.330 T Investasi Rp.243 T | 88% Air Minum 17.000 ha Kumuh 85% Sanitasi Anggaran Rp.128 T | 5 jt Backlog MBR Pembangunan 3,9 juta unit Anggaran Rp.780 T 20%-30% APBN/APBD 70%-80% Swasta/Masyarakat |
| VISIUM 2030 | Kapasitas Tampung 120 m3/c/th Anggaran Rp.1.423 T | Jalan Mantap 99% Jalan Tol 2.000 Km Jalan Baru 3.000 Km Jembatan Baru/FO 70.000 M Anggaran Rp.448 T Investasi Rp.390 T | 100% Air Minum 0 ha Kumuh 100% Sanitasi Anggaran Rp.170 T | 3 jt Backlog MBR Pembangunan 4,88 juta unit Anggaran Rp.1.220 T 20%-30% APBN/APBD 70%-80% Swasta/Masyarakat |





Potret Pengadaan Jasa Konstruksi

Capaian Infrastruktur



INDIKATOR PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

○ 2019 ○ 2015

Prosentase Kondisi mantap jalan

○94 ○93

Peringkat Kemudahan Berusaha Indonesia

menuju menuju
○40 ○114

Prosentase RT menempati hunian layak

○50,0 ○47,8
2018

Solusi dan Arah Kebijakan

2





Perbaikan Regulasi

Kerjasama Operasi sebagai bentuk Pembinaan Usaha

“Leadfirm harus memiliki kualifikasi setingkat atau lebih tinggi dari anggota KSO, dengan porsi modal paling banyak 70%”

Jumlah anggota KSO dibatasi:

- Maksimal 3, untuk pekerjaan tidak kompleks
- Maksimal 5, untuk pekerjaan kompleks



TUJUAN PERBAIKAN

- Mencegah terjadinya praktek “pinjam bendera’ untuk memenangkan sisi Administratif dari Tender/Seleksi
- Mengutamakan kemampuan nyata Penyedia Jasa dalam melaksanakan pekerjaan



Perbaikan Regulasi

Pembenahan Segmentasi Jasa Konstruksi

JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI



PEKERJAAN KONSTRUKSI



TUJUAN PERUBAHAN

- Perluasan *playing field* bagi Usaha Kecil agar dapat lebih berperan serta dalam Jasa Konstruksi
- Mendorong Usaha Besar untuk memiliki profesionalitas dan menjadi Pembina bagi Usaha Kecil



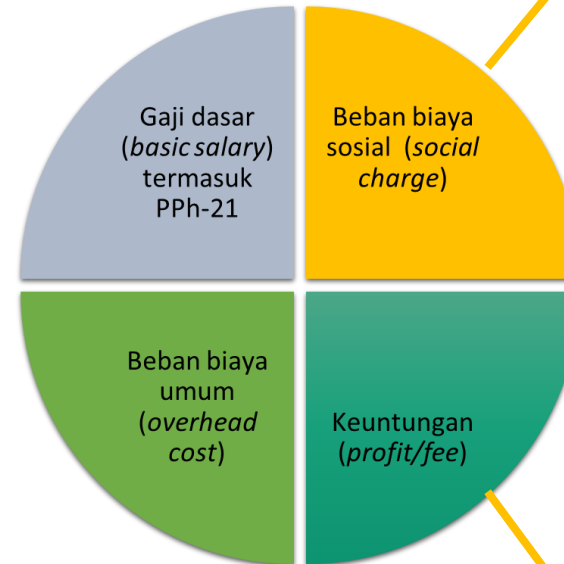
Perbaikan Regulasi

Pengembangan Kapasitas Penyedia Jasa lewat Remunerasi Minimal

TUJUAN PERBAIKAN

- Peningkatan taraf hidup bagi Tenaga Ahli yang merupakan modal bagi Jasa Konstruksi
- Mendorong munculnya Tenaga Ahli baru yang berkualitas

KOMPONEN REMUNERASI



**Pelanggaran akan diberikan
Sanksi Administratif**

Pasal 72 Ayat (3) PMPUPR 07/19

Biaya remunerasi personel inti tenaga ahli pada rincian biaya langsung personel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang bernilai di bawah standar remunerasi minimal tenaga ahli yang ditetapkan Menteri dinyatakan tidak wajar dan nilai penawaran biaya peserta diberi nilai 0 (nol)

IKP Jasa Konsultansi PMPUPR 07/19

Rincian Komponen Remunerasi Personel disampaikan dalam Dokumen Penawaran Biaya.

SSUK Jasa Konsultansi Waktu Penugasan PMPUPR 07/19

Komponen Remunerasi Personel untuk Masa Kontrak lebih dari 18 bulan dapat diberikan penyesuaian harga/eskalasi

SSUK Jasa Konsultansi Waktu Penugasan PMPUPR 07/19

PPK membayar kepada Penyedia Biaya Langsung Personel berupa remunerasi sesuai Waktu Penugasan aktual Personel



Pengaturan Subkontrak

Pekerjaan utama disubkontrakkan kepada penyedia jasa spesialis, dan pekerjaan yang bukan pekerjaan utama kepada sub penyedia jasa Usaha Kecil;

Paket pekerjaan dengan nilai pagu anggaran >Rp25.000.000.000,- sampai dengan Rp 100.000.000.000,- **wajib** mensubkontrakkan sebagian pekerjaan;

Paket pekerjaan dengan HPS > Rp100.000.000.000,- **wajib menominasikan** Penyedia Jasa Sub Kontrak tersebut;

Permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh Subpenyedia dengan prestasi pekerjaan, dilakukan sesuai prestasi pekerjaan yang selesai dilaksanakan;

TUJUAN PERBAIKAN

- Terjadinya proses pembelajaran dari Badan Usaha dengan Kualifikasi Kecil melalui pengayoman dari Badan Usaha Besar dan Menengah
- Mendorong terciptanya Badan Usaha Spesialis sehingga dapat turut berkontribusi dalam Pelaksanaan Pekerjaan sesuai dengan spesialisasinya

Perbaikan Kelembagaan

Transformasi UKPBJ

KONDISI EKSISTING

“dilakukan oleh Pelaksana yang sama (Satker & Unor induk)”

PERENCANAAN

PEMILIHAN

PELAKSANAAN

PENGAWASAN

TRANSFORMASI

KONDISI KEDEPAN

“dilakukan oleh Satker & Unor induk”

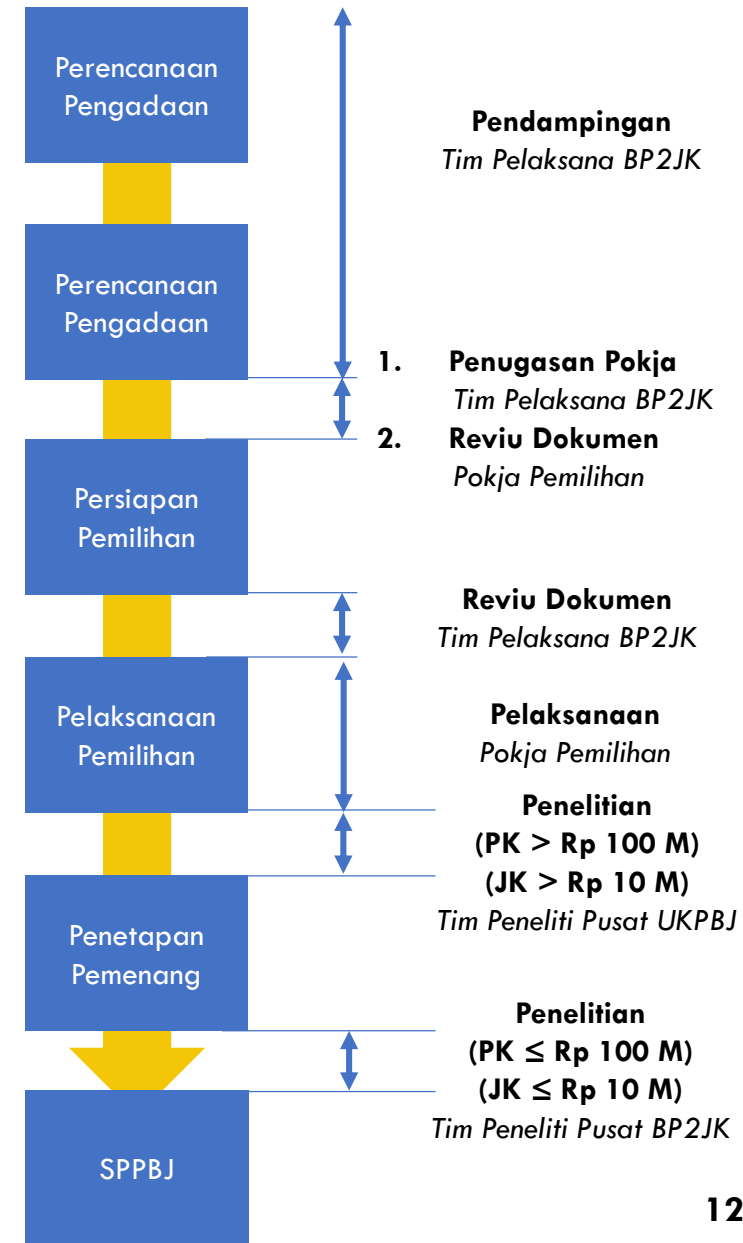
PERENCANAAN

PEMILIHAN

PERENCANAAN

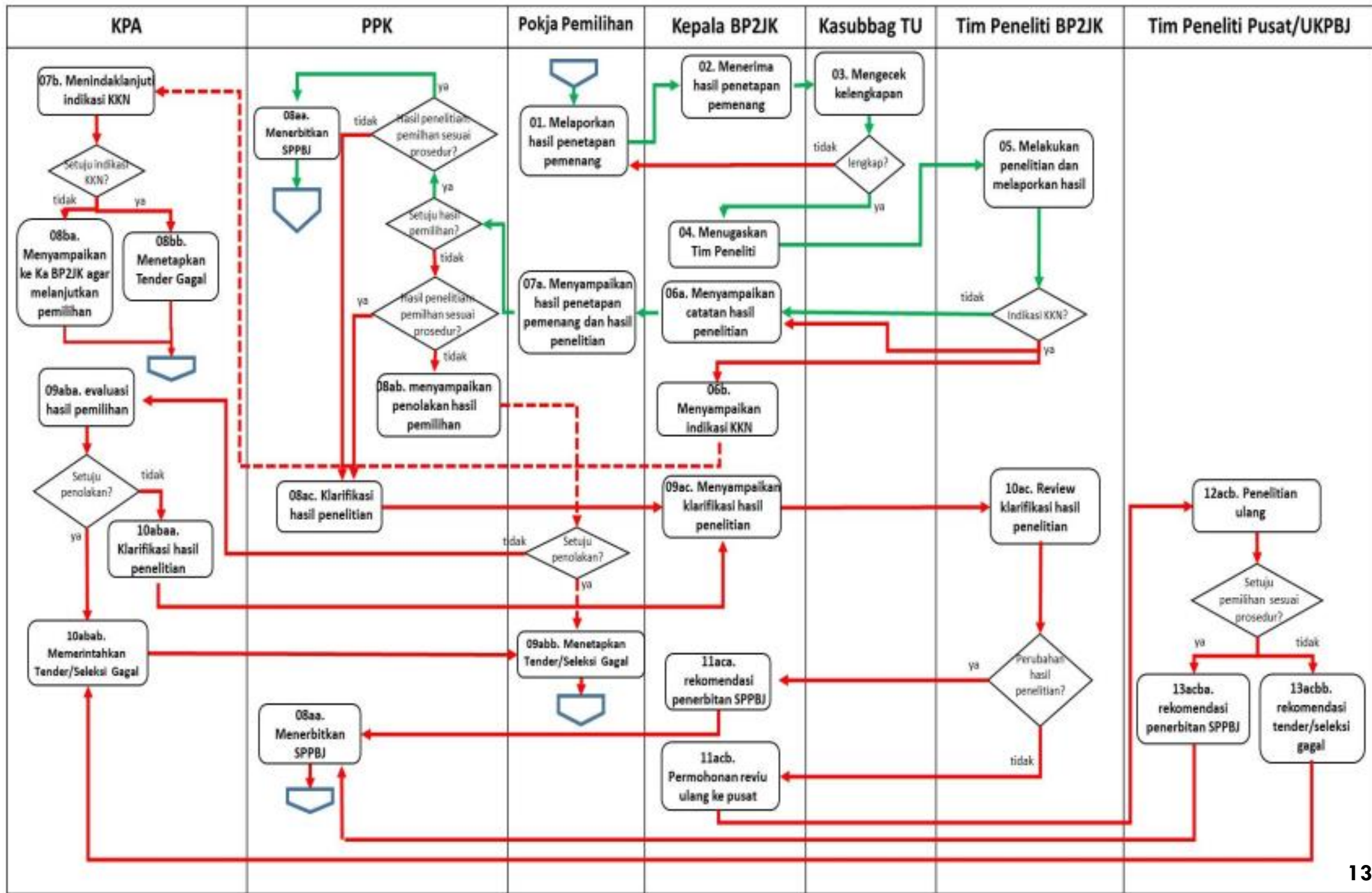
PENGAWASAN

“dilakukan oleh BP2JK dibawah Ditjen Bina Konstruksi”



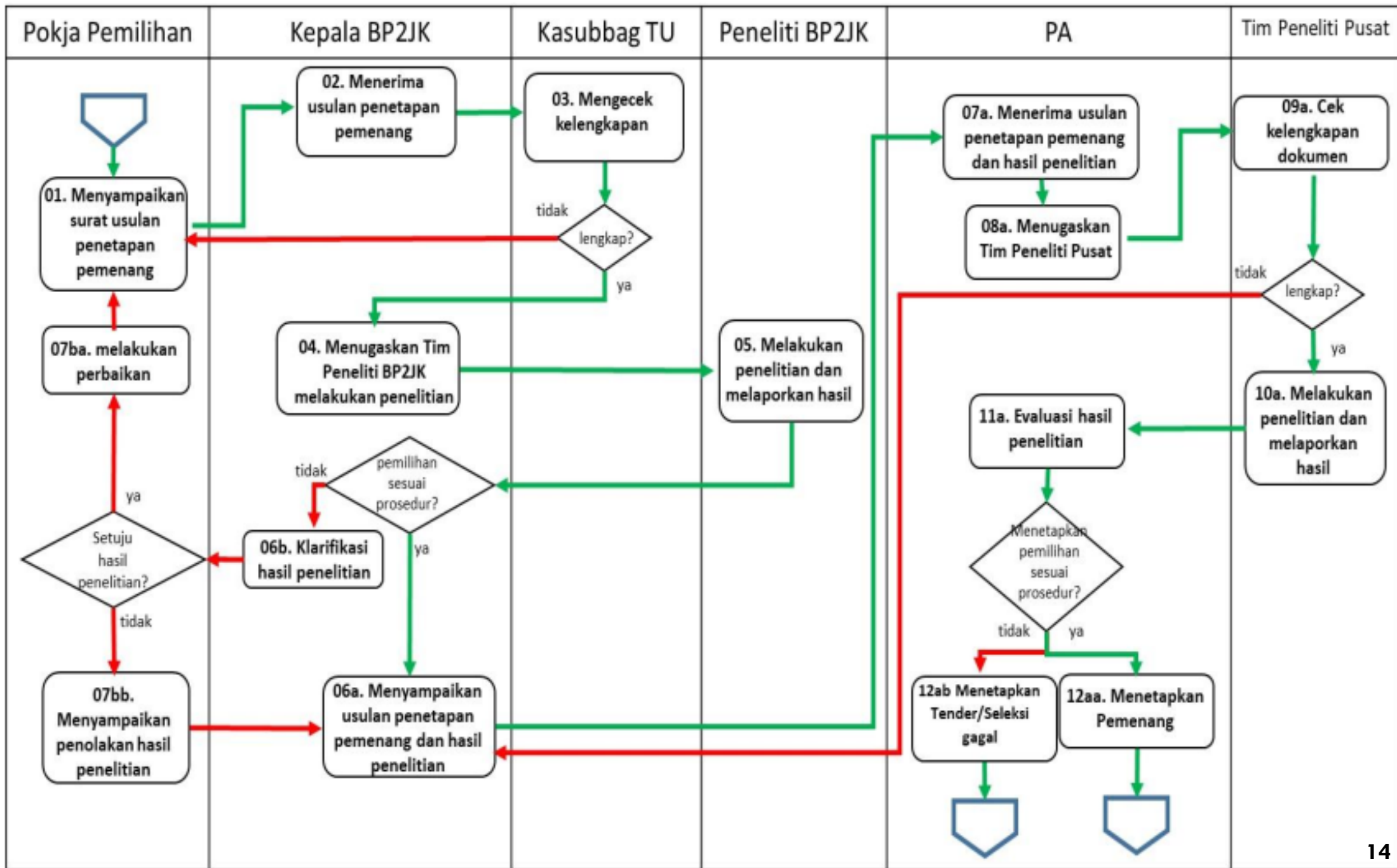
Perbaikan Kelembagaan

Transformasi Proses Penetapan Pemenang Pemilihan (PK \leq Rp 100M atau JK \leq Rp 10 M



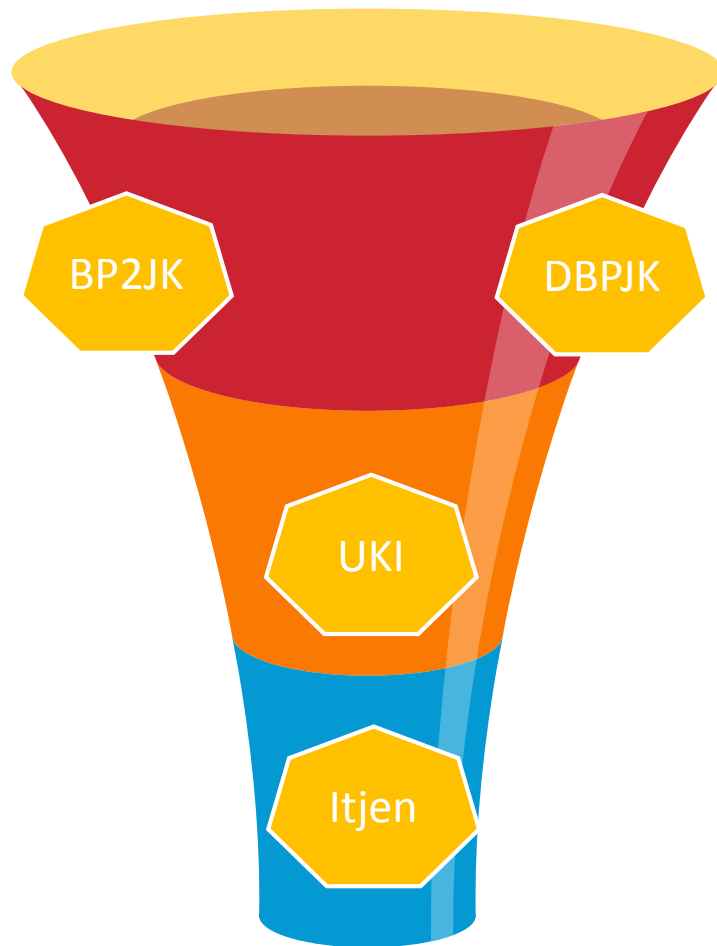
Perbaikan Kelembagaan

Transformasi Proses Penetapan Pemenang
Pemilihan (PK > Rp 100M atau JK > Rp 10 M





Perbaikan Pengawasan



1st line of Defense (Risk Owner)

- Balai P2JK dan DBPJK menjadi bagian dari TPPBJ untuk paket dengan kriteria tertentu.
- TPPBJ memeriksa kesesuaian administrasi proses Tender/Seleksi

2nd line of Defense (Risk Management)

UKI melakukan pengendalian internal terhadap Balai P2JK dan DBPJK beserta jajarannya dengan Random Sampling dan Purpose Sampling

3rd line of Defense (Internal Audit)

Inspektorat Jenderal melakukan pengendalian terhadap Proses Pengadaan di Kementerian PUPR

TUJUAN PERBAIKAN

- Perlu dilakukan pengendalian risiko pada unit organisasi untuk mencegah terjadinya penyimpangan, dan mendorong ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan
- Pelaksanaan Pengendalian dalam bentuk Pemantauan dan Evaluasi serta Pendalaman



Peningkatan Kompetensi SDM



Sumber: Emon status 10 Maret 2019 dan hasil kajian Pustra PUPR

TENAGA KERJA KONSTRUKSI 2018

8.300.297

Total

Sumber: BPS, 2018

• **616.081 (7,42%)**

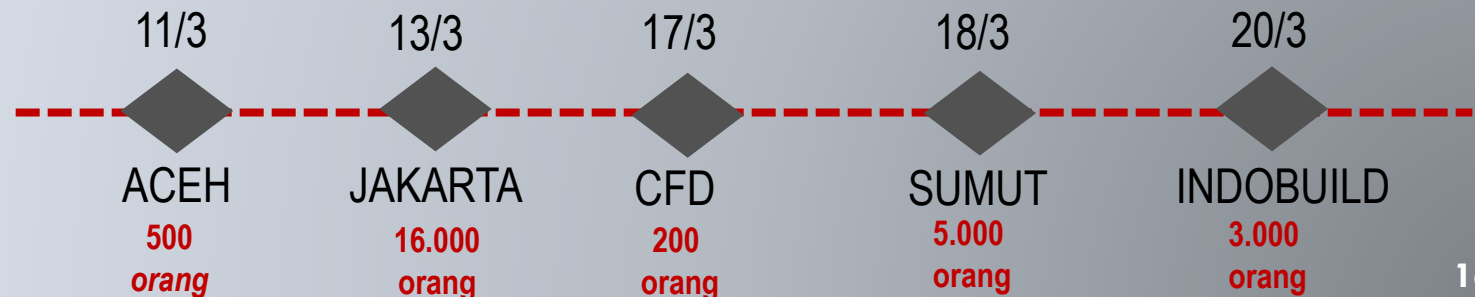
Bersertifikat

Sumber: LPJKN, 2018

• **405.919**

Belum bersertifikat

KEGIATAN UJI SERTIFIKASI



KEBIJAKAN PEMERINTAH

PROGRAM PERCEPATAN SERTIFIKASI TENAGA AHLI

- Peningkatan kompetensi berbasis sistem informasi
- Percepatan sertifikasi calon tenaga ahli muda sesuai SE LPJKN 02/2019

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR LEWAT BPSDM



Keluaran Kebijakan Pengadaan Jasa Konstruksi Kedepan

- Penurunan Permasalahan Pengadaan yang diambil dari Indikator Jumlah Sanggahan dan Laporan yang diterima
- Perluasan Kapasitas Usaha Badan Usaha Jasa Konstruksi yang didukung dengan Profesionalitas dan Integritas
- Penyelesaian Permasalahan Pengadaan sejak dini yang tentunya dimulai dari Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi sebagai ujung tombak terdepan



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI



TERIMA KASIH